

**“Bela Negara sebagai Instrumen Pembentukan Warga Negara  
yang Baik (*Good Citizen*) dan Instrumen dalam Indeks Persepsi  
Kewarganegaraan”**

**Raharjo**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah merdeka selama 70 tahun, kita mengetahui bersama bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah menempuh perjalanan yang panjang, dimulai dari masa sebelum dan selama penjajahan, dilanjutkan dengan era merebut dan mempertahankan kemerdekaan hingga mengisi kemerdekaan. Masing-masing tahap tersebut melahirkan tantangan zaman yang berbeda sesuai dengan kondisi dan tuntutan zamannya. Tantangan zaman itu ditanggapi bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa, yang dilandasi dengan jiwa dan tekad kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam wadah Nusantara. Di era revolusi fisik, semangat perjuangan bangsa yang tidak kenal menyerah, yang hakekatnya merupakan kekuatan mental spiritual bangsa telah melahirkan perilaku heroik dan patriotik, serta menumbuhkan kekuatan, kesanggupan dan kemauan yang luar biasa. Idealnya, dalam situasi dan kondisi apapun semangat juang itu hendaknya tetap dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Di samping sudah terbukti keandalannya, nilai-nilai tersebut terbukti masih relevan untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun demikian sebagai fenomena sosial, nilai-nilai itupun mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan nasional.

Baru-baru ini, fenomena dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam hal pertahanan dan keamanan negara ramai dibicarakan,

adalah terkait dengan program “Bela Negara” yang dicetuskan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kementerian Pertahanan telah resmi membuka program Bela Negara pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015. Pembukaan ini dilaksanakan secara serentak di 44 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Total peserta Bela Negara berjumlah 4.500 orang di seluruh Indonesia. Mereka berasal dari berbagai kalangan dan usia. Ada yang dari mahasiswa, guru, dosen, PNS dan sebagainya. Usia Mereka berkisar antara 17-50 tahun. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa "Landasan kita, Bela Negara adalah roh suatu bangsa. Kalau tidak ada roh, mati. Kalau ada roh, membela". Ryamizard menegaskan, program Bela Negara bukanlah wajib militer. Membela negara, secara fisik dilakukan oleh TNI. Namun program Bela Negara ini lebih menyoar pada *soft power*, bukan *hard power*. "Membela negara secara fisik jelas ada di TNI. Tapi perang ke depan bukan tembak menembak, tapi mengubah pemikiran atau yang kita sebut cuci otak". Menhan Ryamizard kemudian mengupas lagu Indonesia Raya. Di dalam lagu kebangsaan tersebut, disebutkan bahwa setiap rakyat harus menjadi pandu bagi bangsanya. Pandu yang dimaksud dalam lagu tersebut adalah menjaga. "Kemudian bangun jiwanya. Bangun jiwa itu agar tidak rusak bangsa kita. Baru setelah itu raga," terang Ryamizard. Dengan jiwa yang terbangun, kecintaan terhadap negara akan semakin kuat. Hal itu, kata Ryamizard, dapat memupuk rakyat untuk bekerja mati-matian demi bangsa.<sup>1</sup>

Selanjutnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga menyampaikan betapa pentingnya program bela negara bagi rakyat Indonesia. Hal utama yang dibangun dalam program bela negara adalah rasa cinta tanah air. Program bela negara ini bersifat sukarela. Siapapun dapat mengikuti program tersebut sepanjang fisiknya mampu dan berusia 17-50 tahun. "Ini tidak retorika. Kebanyakan sukarela, di sana kita menanamkan, mengajarkan mereka, baik secara fisik dan non fisik," ujar Ryamizard di Badiklat Kemhan, Jl Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2015). Ryamizard mengaku tidak mudah menilai kesuksesan program bela negara karena yang ditempa adalah *soft power*. Oleh karenanya,

---

<sup>1</sup> Detik.com, berita Bela Negara: Menhan: Perang ke Depan Bukan Tembak Menembak, Tapi Cuci Otak, Kamis 22 Oktober 2015

program ini harus terus dilakukan, khususnya di daerah-daerah agar semangat mencintai tanah air tidak padam. Kekuatan *soft power* ini, menurut Ryamizard, akan mampu mengalahkan kekuatan alutsista. Beliau mencontohkan kondisi bangsa Indonesia selama masa penjajahan. Kala itu rasa cinta tanah air tertanam begitu kuat sehingga meski hanya bermodal bambu runcing sekalipun, Indonesia dapat mengalahkan penjajah yang mengerahkan alutsista canggih. "Jadi *soft power* itu memberikan efek getar agar negara-negara lain tidak main-main. Bayangkan melawan 100 juta orang. Kalau beli alutsista, negara lain akan mencari celah untuk meng-*counter*. Tapi kalau bela negara, intelijen mereka bingung," ujarnya. "Kalau *soft power* kuat, 100 negara pun tak akan mampu menggoyang," imbuh Ryamizard.<sup>2</sup>

Demikian terkait program bela negara ini yang dijelaskan oleh Menhan RI, yang selanjutnya menimbulkan berbagai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian rakyat Indonesia mendukung adanya program bela negara yang ditandai dengan datang pada program tersebut dan bersedia menjadi peserta program bela negara ini, namun tidak sedikit yang kemudian menyatakan tidak sepakat dengan program yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan ini, dengan berbagai alasan, diantaranya adalah pemikiran masyarakat yang masih rancu terkait dengan istilah bela negara yang kemudian disangkut pautkan dengan mobilisasi militer atau sering dikenal sebagai wajib militer seperti yang dilakukan beberapa negara lain, kemudian juga ada yang menyoroti program ini dari sisi anggaran, apakah dengan adanya program ini tidak membutuhkan anggaran yang banyak?, dengan target peserta 100 juta orang, tentunya memerlukan anggaran yang tidak sedikit, sedangkan anggaran pada saat ini lebih baik digunakan untuk fokus pada penumbuhan ekonomi nasional yang pertumbuhannya melambat dan merasa bahwa permasalahan pertahanan dalam hal ini bela negara belum waktunya untuk diprioritaskan menjadi program yang beranggaran besar. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, pada dasarnya bela negara merupakan hal yang sangat penting dan fundamental bagi bangsa Indonesia, hal ini dibuktikan bahwa secara eksplisit

---

<sup>2</sup> Detik.com, berita Bela Negara: Menhan: Kalau Soft Power Kuat, 100 Negara pun Tak akan Mampu Menggoyang, Kamis, 22 Oktober 2015

bela negara disebutkan dalam UUD NRI 1945 pada Pasal 27 ayat (3) bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Pasal 30 ayat (1) menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Ayat (2) berbunyi “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. Pasal-pasal ini menerangkan kepada kita sebagai warga negara Indonesia untuk kemudian melaksanakan kewajiban kita yaitu “Bela Negara”.

Sampai saat ini, belum ada Undang-Undang yang dibuat khusus untuk bela negara, padahal jelas sekali terkait dengan bela negara ini disebutkan secara eksplisit pada UUD NRI 1945, namun begitu DPR RI belum juga mewujudkan peraturan yang lebih rinci dan lebih jelas dalam bentuk Undang-Undang. Meskipun belum dibuat Undang-Undang secara khusus tentang bela negara, namun poin bela negara ini sudah disinggung dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 ayat 2 yang menerangkan bahwa Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan bersifat semesta yang melibatkan: seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, disiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut, dengan tujuan untuk menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Kemudian Pasal 7 ayat (2) "Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung". Namun demikian, bagi masyarakat umum, pernyataan-pernyataan dalam UUD NRI 1945 maupun dalam Undang-Undang, tidak bisa langsung dipahami begitu saja, sehingga muncul berbagai persepsi atau pandangan dari masyarakat yang bermacam-macam, banyak masyarakat yang tetap menganggap bahwa bela negara selalu berkaitan dengan militer, dan belum banyak yang memahami bahwa pada dasarnya bela negara memang kewajiban bagi setiap warga negara dan bentuknya dengan banyak cara. Hal inilah yang akan penulis bahas pada *paper* ini, yaitu terkait dengan pembahasan mendalam tentang

bela negara yang akan dibagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah bahwa bela negara sebagai instrumen untuk pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*) yang akan membahas bela negara dalam ranah pendidikan dan yang kedua adalah bahwa bela negara sebagai instrumen indeks persepsi kewarganegaraan yang akan membahas bela negara sebagai instrumen penilaian persepsi sikap warga negara terhadap negaranya.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

Pada bagian ini akan dibahas mengenai dua bagian yang telah dijelaskan pada akhir pendahuluan di atas, namun sebelum itu, penulis akan menguraikan mengenai apa itu bela negara melalui kajian pustaka sebagai berikut:

Bahwa untuk landasan dari bela negara sudah penulis sampaikan pada bagian pendahuluan yang pada intinya secara eksplisit bela negara disebutkan dalam UUD NRI 1945 merupakan suatu kewajiban bagi warga negara Indonesia yang konsekuensinya harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Namun untuk mengetahui lebih dalam mengenai bela negara, perlu dipahami terkait dengan pengertian bela negara itu sendiri dan nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya.

#### **- Pengertian Bela Negara**

Pengertian Bela Negara hingga saat ini masih dipersepsikan identik dengan Pertahanan dan Keamanan (Dirjen Pothan Dephan, 2004 : 1). Persepsi ini muncul karena sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, keikutsertaan warganegara dalam Bela Negara berwujud dalam kegiatan di bidang pertahanan dan keamanan, namun dalam kenyataannya pengertian Bela Negara mengalami perkembangan. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Departemen Pertahanan RI membuat periodisasi pengertian Bela Negara dimulai dari tahun 1945 sampai sekarang yang dimulai dari :

- a. Periode 1945 – 1949. Bela Negara dipersepsikan dengan perang kemerdekaan, baik bersenjata maupun tidak bersenjata.
- b. Periode 1950 – 1966. Bela Negara dipersepsikan identik dengan Pertahanan Keamanan (Hankam).
- c. Periode 1998 – Sekarang (Era Reformasi). Pemahaman Bela Negara pada era reformasi saat ini masih tetap, yakni identik dengan Ketahanan Nasional, namun ciri khas secara umum tekanannya pada masalah demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup serta penegakkan

hukum yang menjadi prioritas utama dan harus dijunjung tinggi. (Dirjen Pothan Dephan, 2004 : 2)

Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Padahal berdasarkan pasal 30 UUD 1945, Bela Negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Bela Negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri. UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia; mengatur tata cara penyelenggaraan pertahanan negara yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun oleh seluruh komponen bangsa. Bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Pembelaan negara bukan semata-mata tugas TNI, tetapi segenap warga negara sesuai kemampuan dan profesinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Era reformasi membawa banyak perubahan di hampir segala bidang di Republik Indonesia; ada perubahan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat, tapi tampaknya ada juga yang negatif dan pada gilirannya akan merugikan bagi keutuhan wilayah dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Bela Negara juga diartikan sebagai tekad, sikap dan tindakan warga Negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bemegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi Negara, kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan Negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Basrie, 1998: 8).

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan pengertian arti dari bela negara itu sendiri adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki tekad, sikap dan perilaku yang dijiwai cinta NKRI (Negara

Kesatuan Republik Indonesia) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang rela berkorban demi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Adapun kriteria warga negara yang memiliki kesadaran bela negara adalah mereka yang bersikap dan bertindak senantiasa berorientasi pada nilai-nilai bela negara.

#### - **Nilai-Nilai Dalam Bela Negara**

Nilai adalah idea atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan seseorang atau dianggap penting oleh seseorang. (Fraenkel 1977 : 7). Menurut Fraenkel (1977:6) "*A Value is an idea - a concept - about what someone thinks is important in life*". (Nilai adalah gagasan-konsep-tentang sesuatu yang dipandang penting oleh seseorang dalam hidup). Sedangkan Bartens (2004 : 5) mengemukakan nilai memiliki 3 (tiga) ciri, yaitu 1) nilai berkaitan dengan subyek. Kalau tidak ada subyek yang menilai, maka nilai juga akan tidak ada. Bartens memberikan ilustrasi entah manusia hadir atau tidak, gunung tetap meletus. Tapi untuk dapat dinilai sebagai 'indah' atau 'merugikan' gunung berapi itu memerlukan subyek untuk menilai; 2) nilai tampil dalam suatu konteks praktis; dan 3) nilai-nilai menyangkut sifat-sifat yang ditambah oleh subyek pada sifat-sifat yang dimiliki oleh obyek. Ralph Barto Perry dalam *Introductory Reading in Ethics* (1974 : 12) menjelaskan bahwa "*a thing-any thing- has value, or is Valuable, in the original and generic sense when it is the object of an interestany interest. Or, whatever is an object of interest is also facto Valuable*". Lebih jauh dinyatakan bahwa : "*Interest is a train of events determined by expectation of its outcome*". Selain itu William J. Rothwell (1996 : 23) menyatakan "*Values is a belief about what is good or bad, important or unimportant. The values of those who hold power fundamentally shape the character of an organization*". Menurut *Dictionary of Sociology and Related Science* (Kaelan, 2002, : 174): *Value, the believed capacity of any object to satisfy human desire, the quality of any object which causes it to be of interest to an individual or a group.* (Nilai adalah kemampuan yang diyakini terdapat pada suatu objek untuk memuaskan hasrat manusia, yaitu kualitas objek yang menyebabkan tertariknya individu atau kelompok). Sedangkan menurut Djahiri (2007 :23) berpendapat bahwa nilai adalah "sesuatu yang berharga, baik menurut standar logika (benar-salah), estetika



(bagus-buruk), etika (adil, layak-tidak layak), agama (dosa dan haramhalal) dan hukum (sah-absah) serta menjadi acuan dan atau sistem keyakinan diri maupun kehidupannya”. Lebih lanjut dikatakan bahwa “nilai ini ada dan berkembang dalam berbagai gatra hidup, yakni suatu keilmuan dan ipoleksosbudhankam kehidupan”.

Dalam kaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Bela Negara, Frans M. Suseno (1988: 39) mengemukakan :

1. Nilai-nilai kejuangan 1945
2. Nilai-nilai berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
3. Pewaspadaan terhadap nilai-nilai (asing) yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia
4. Nilai-nilai patriotisme

Nilai-nilai Bela Negara harus diartikan sebagai salah satu nilai-nilai operasional pembangunan nasional yang bersumber pada nilai-nilai kejuangan 1945. Kedudukan nilai-nilai Bela Negara dalam hubungannya dengan seperangkat nilai-nilai yang melandasi pembangunan nasional Indonesia. Pada hakikatnya nilai-nilai inilah yang kemudian diwujudkan ke dalam bentuk nyata dalam sikap dan tindakan yang patriotik dan pada akhirnya akan menunjukkan sikap nasionalisme.

Selanjutnya adalah pembahasan mengenai dua hal kaitannya dengan bela negara yang akan penulis paparkan pada *paper* ini, yaitu:

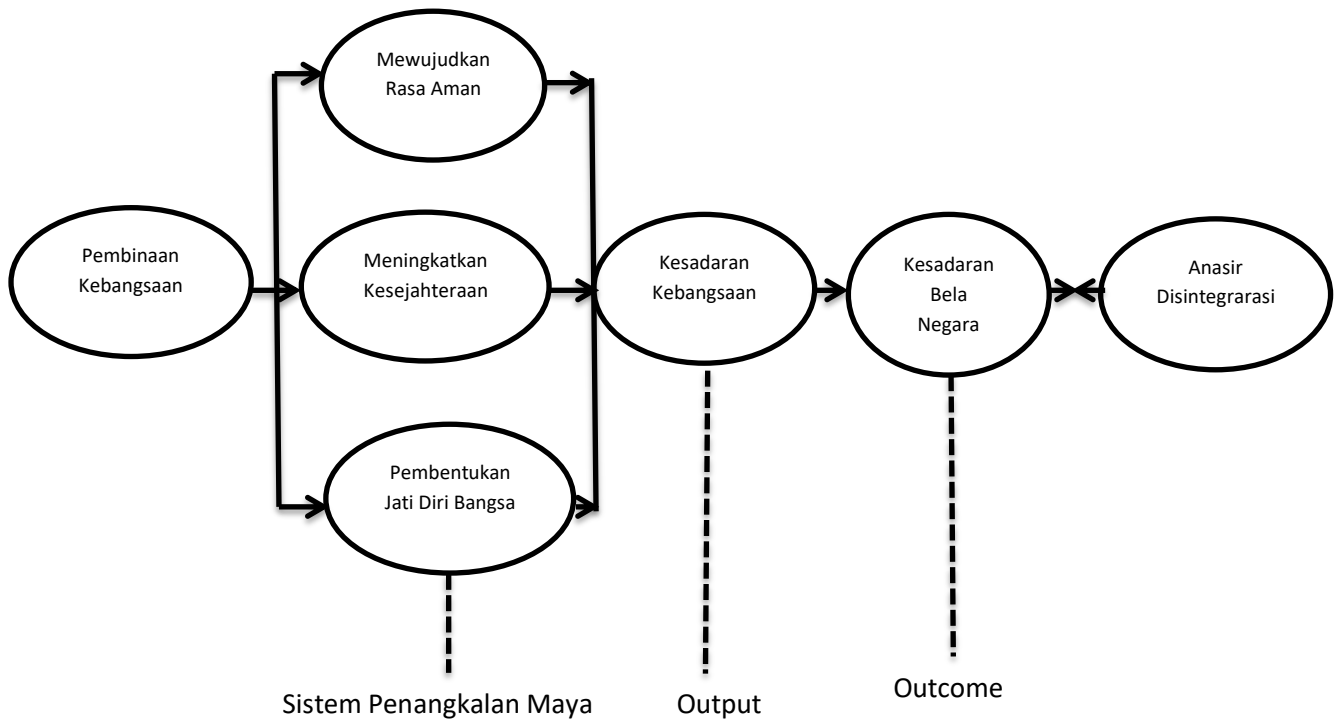
#### **A. Bela Negara sebagai Instrumen untuk Pembentukan Warga Negara yang Baik (*Good Citizen*)**

Ranah pada pembahasan bela negara bagian ini adalah terkait dengan bela negara dalam ranah pendidikan. Bahwa sudah barang tentu setiap negara menginginkan warga negaranya menjadi warga negara yang baik, cerdas, dan memiliki jiwa nasionalisme. Bela negara akan sangat berperan apabila diimplementasikan oleh masyarakat, namun agar masyarakat dapat dengan jelas mengerti dan memahami apa itu bela negara, maka salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah dengan adanya pendidikan, pendidikan bagi warga negara, atau kita kenal dengan pendidikan kewarganegaraan. Dalam perkembangannya, seperti

adanya globalisasi, perkembangan teknologi yang pesat, membuat suatu negara harus mempersiapkan segala kemungkinan-kemungkinan yang sedang dan akan terjadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, bela negara seperti yang telah diuraikan pengertiannya di atas merupakan upaya dan sikap yang mulia yang seharusnya sama-sama dilakukan oleh warga negara. Perkembangan zaman, munculnya fenomena dan isu-isu baru serta adanya globalisasi menuntut Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan *civic competence* yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) yang multidimensional (Komalasari dan Budimansyah, 2008:77), ketiga hal ini adalah poin penting dalam pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*).

Pendidikan menjadi penting karena untuk meluruskan persepsi tentang bela negara itu sendiri, agar masyarakat memahami betul apa arti yang sebenarnya dari bela negara, agar tidak terjadi multitafsir dan perbedaan persepsi yang berlebihan pada bela negara ini di masyarakat. William F. O'neil (2008:70) memaparkan bagan tentang pendidikan yang dikaitkan dengan struktur pengalaman, yang apabila di narasikan adalah sebagai berikut: Dimulai dari sifat diri objektif (generik dan idiosinkratis) dan sifat lingkungan objektif (umum dan khusus) menghasilkan perilaku yang diperantarai oleh konsekuensi-konsekuensi hedonis, menimbulkan belajar yang pada puncaknya melahirkan tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang membentuk landasan bagi struktur watak yang merupakan variabel personal penentu cara pemahaman individu dan karenanya akan dikaitkan dengan keadaan-keadaan khusus yang melahirkan tipe-tipe perilaku yang lebih canggih yang pada akhirnya dapat merubah keyakinan-keyakinan. Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu pemberian informasi yang diberikan secara bertahap dan dalam prosesnya diinternalisasikan nilai-nilai, dalam hal ini adalah nilai-nilai bela negara. Bela negara sendiri diperlukan sebagai konsekuensi implementasi pembentukan dan pembinaan komponen cadangan, penataan komponen pendukung serta penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan, untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizen*).

Dalam hal bela negara, pendidikan juga erat kaitannya dengan pembinaan. R.M. Sunardi dalam bukunya Pembinaan Kebangsaan Indonesia menerangkan terkait dengan pembinaan kebangsaan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar Proses Pembinaan Kebangsaan (R.M. Sunardi, 2005: 50)

Gambar di atas memberikan penjelasan kepada kita bahwa untuk membentuk suatu kesadaran bela negara membutuhkan proses yang dapat dikatakan cukup panjang, tidak secara langsung tiba-tiba bela negara itu diberitahukan secara bulat, tapi ada prosesnya. Pembinaan kebangsaan ditujukan untuk mewujudkan perekat kebangsaan yang kokoh serta membentuk karakter bangsa yang tangguh agar dengan demikian seluruh bangsa mampu menghadapi anasir-anasir disintegrasi dari luar maupun dari dalam negeri (R.M. Sunardi, 2005: 47). Bela negara itu sendiri pada dasarnya terbagi menjadi 2 spektrum yaitu *Soft* (halus) yang terdiri dari *Psychological* berupa pemahaman ideologi negara (Pancasila & UUD 1945), nilai-nilai luhur bangsa, wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan bangsa, kesadaran bela negara serta *Physical* berupa perjuangan mengisi kemerdekaan, pengabdian sesuai profesi,

menjunjung tinggi nama Indonesia di dunia internasional, melalui kesenian, Olahraga, penanganan bencana dan menghadapi ancaman non militer lainnya (ekonomi, sosial, budaya, dll) dan juga spektrum *Hard* (keras) berupa menghadapi ancaman militer yang terdiri dari komponen cadangan dan komponen pendukung. Kedua spektrum inilah yang paling tidak diketahui oleh semua warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan dan pembinaan kebangsaan, dan pada akhirnya adalah membentuk warga negara yang baik dengan mempraktekan apa saja yang bisa dilakukan oleh warga negara dalam rangka pembelaan negara, hal ini sejalan dengan pemikiran Freddy K. Kalidjernih (2011: 167) yang menyatakan bahwa tujuan utama pendidikan kewarganegaraan bentuk apapun adalah mempersiapkan seorang warga negara yang baik. Melalui pendidikan kewarganegaraan serta pembinaan kebangsaan dalam bentuk pendalaman *civic knowledge* (pengetahuan), *civic skill* (ketrampilan kewarganegaraan), dan *civic disposition* (sikap kewarganegaraan) diharapkan akan terbentuk suatu karakter warga negara yang baik (*good citizen*).

## **B. Bela Negara sebagai Instrumen Indeks Persepsi Kewarganegaraan`**

Terkait dengan bahasan ini, penulis akan menyampaikan hasil penelitian dari penelitian yang dilakukan Fauzie (2007) yang mengungkapkan bahwa mahasiswa Bandung, 60% responden merasa tidak bangga sebagai bangsa Indonesia, 24,3% merasa bangga, 3,1% tidak tahu, dan 12,6% biasa saja. Hasil penelitian tersebut, kalau kita amati, ada kecenderungan bela negara di kalangan mahasiswa mulai menurun bahkan dapat dikatakan mulai luntur. Ini terlihat dari banyaknya peristiwa yang terjadi di tanah air, seperti pertikaian antar kelompok, ras, suku atau etnik, dan agama. Membahas indeks, maka kita akan membahas penilaian, ukuran, indikator-indikator yang dapat digunakan, dan bela negara dapat digunakan sebagai salah satu instrumen indeks persepsi dalam hal kewarganegaraan.

Persepsi tentang pengertian pembelaan negara secara umum identik dengan pemahaman pertahanan keamanan. Tanggapan seperti ini memang wajar, karena sejak Indonesia merdeka dan atau berdiri keikutsertaan warga negara

dalam bela negara terwujud dalam kegiatan pertahanan keamanan. Atas dasar ini maka persepsi pemerintah maupun masyarakat terhadap bela negara, yaitu setelah seorang warga negara tersebut melaksanakan kegiatan dibidang komponen-komponen kekuatan pertahanan keamanan.

Persepsi dan pengertian bela negara pada perkembangan tahun 1945-1949 dimana saat itu merupakan periode perang kemerdekaan menghadapi ancaman dari Belanda bahwa warga negara dianggap telah menunaikan hak dan kewajiban dalam bela negara sebagaimana diminta dalam pasal 30 UUD 1945, apabila ia ikut serta dalam perang kemerdekaan, baik bersenjata maupun tidak bersenjata. Perkembangan berikutnya adalah periode tahun 1950 – 1966 bahwa bela negara dipersepsikan identik dengan pertahanan keamanan dalam arti bahwa warga negara dikatakan ikut bela negara, apabila ia ikut serta dalam kegiatan kegiatan baik langsung maupun tidak langsung dalam salah satu komponen kekuatan pertahanan keamanan. Sedang pada masa pemerintahan Orde Baru (1966 – 1998) dimana ancaman yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia semakin kompleks maka mulai dikenalkan dan dikembangkan tentang konsepsi Ketahanan Nasional.<sup>3</sup>

Dalam hal ini, bela negara dapat dijadikan sebagai parameter keuletan seperti yang dijelaskan R. M. Sunardi dalam tabelnya tentang contoh parameter keuletan sebagai berikut:

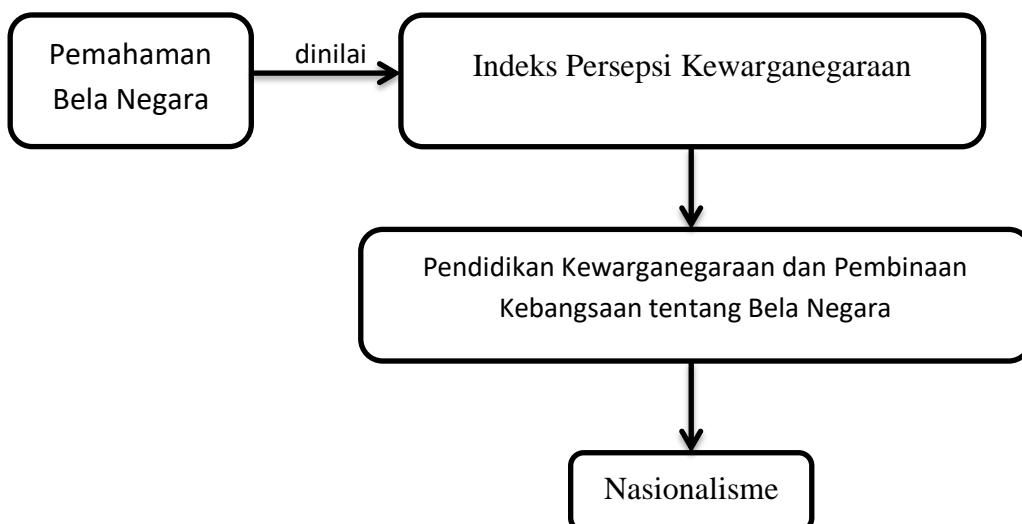
No.	Interaksi	Elemen	Parameter
1.	MPS-SOSPOL	R12	1) Pencerminan moralitas Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 2) Tingkat kepatuhan pada hukum nasional. 3) Kualitas aparatur negara. 4) Persatuan dan kesatuan nasional.
2.	MPS-SOSEK	R13	5) Pemerataan pendapatan dan pembangunan. 6) pemanfaatan sumber kekayaan alam secara bertanggung jawab. 7) Pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila. 8) Tingkat pengaruh dalam masyarakat.

<sup>3</sup> Drs. H. Sutarman, Ws. M.Si, Jurnal Magistra No. 75 Th. XXIII Maret 2011 77 ISSN 0215-9511, hlm. 80

3.	MPS-SOSBUD	R14	9) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk. 10) Pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mampu mengembangkan identitas nasional. 11) Kondisi kehidupan antar suku, pemeluk agama dan ras (SARA). 12) Disiplin Nasional.
4.	MPS-HKM NEG	R15	13) Kesadaran bela negara. 14) Disiplin tentara. 15) ABRI wajib. 16) Asas-asas kepemimpinan ABRI.
5.	SOSPOL-SOSEK	R23	17) Minat berkoperasi. 18) Pelaksanaan sistem anak angkat, PIR dan sejenisnya. 19) Pembinaan sektor informal. 20) Manajemen permasalahan keagrariaan.
6.	SOSPOL-SOSBUD	R24	21) Identitas Nasional. 22) Pelaksanaan kontrol sosial. 23) Kesadaran politik masyarakat. 24) Toleransi antar umat beragama.
7.	SOSPOL-HKM NEG	R25	25) Pelaksanaan UU No.20/1983. 26) Kemanunggalan TNI-Rakyat. 27) Peranaan TNI dalam pembangunan. 28) Stabilitas kondisi sosial.
8.	SOSEK-SOSBUD	R34	29) Produktivitas tenaga kerja. 30) Pelaksanaan perburuan industrial Pancasila 31) Pelaksanaan pola hidup sederhana dan tidak konsumtif. 32) Jaminan hari tua.
9.	SOSEK-HKM NEG	R35	33) Kemanan jalannya pembangunan nasional. 34) penyediaan lapangan kerja dalam industri dan jasa hankam. 35) Tingkat kesejahteraan prajurit. 36) Kondisi sosial ekonomi dalam menunjang logistik hankam.
10.	SOSBUD-HKM NEG	R45	37) Partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungannya. 38) Pandangan masyarakat terhadap dinas militer. 39) Kualitas input TNI 40) Pelaksanaan Bhakti TNI untuk kepentingan masyarakat.

Dari tabel tersebut dapat kita jadikan parameter apabila kita menginginkan sebuah penilaian, untuk bela negara, ada pada interaksi MPS-HKM NEG, disini ditulis poin pertama adalah bela negara untuk parameternya, kemudian parameter lain terkait bela negara adalah ada pada interaksi SOSBUD-HKM NEG yaitu parameter partisipasi masyarakat dalam lingkungannya. Ini berarti, bela negara dapat dinilai untuk dijadikan indeks sebuah persepsi tentang kewarganegaraan, penilaiannya tentu pada masing-masing individu. Adapun poin-poin yang lebih spesifik yang dapat dinilai adalah terkait dengan spektrum *soft* bela negara itu sendiri yaitu *psychological* yang terdiri dari pemahaman ideologi negara (Pancasila & UUD 1945), nilai-nilai luhur bangsa, wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan bangsa, kesadaran bela negara. Kemudian penilaian *physical* berupa perjuangan mengisi kemerdekaan, pengabdian sesuai profesi, menjunjung tinggi nama Indonesia di dunia internasional. (melalui kesenian, olahraga, dan lainnya, serta penanganan bencana dan menghadapi ancaman non militer lainnya (ekonomi, sosial, budaya, dsb).

Pada muaranya, penilaian indeks persepsi dengan instrumen bela negara ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi dan situasi masyarakat yang sebenarnya, terutama terkait dengan pemahaman bela negaranya, dan setelah itu dilakukan pendidikan kewarganegaraan dan pembinaan kebangsaan terkait dengan bela negara dan pada akhirnya akan membentuk nasionalisme warga negara. Apabila dibuat bagan, adalah sebagai berikut:



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari *paper* ini adalah terkait dengan dua hal yang telah dijelaskan pada pembahasan, bahwa bela negara merupakan instrumen untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizen*) melalui pendidikan kewarganegaraan dan pembinaan kewarganegaraan, perlu diketahui bahwa bela negara yang ditekankan disini adalah terkait dengan spektrum bela negara yang *soft* yaitu pemahaman dan perilaku warga negara terkait *psychological* yang terdiri dari pemahaman ideologi negara (Pancasila & UUD 1945), nilai-nilai luhur bangsa, wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan bangsa, kesadaran bela negara. Kemudian penilaian *physical* berupa perjuangan mengisi kemerdekaan, pengabdian sesuai profesi, menjunjung tinggi nama Indonesia di dunia internasional, serta penanganan bencana dan menghadapi ancaman non militer lainnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa dari komponen spektrum diatas, bela negara dapat digunakan sebagai instrumen penilaian indeks persepsi kewarganegaraan, yaitu bagaimana kondisi masyarakat terkait dengan poin-poin spektrum di atas, penilaian ini adalah untuk mengetahui sebesar apa indeks persepsi kewarganegaraan yang ada pada masyarakat, setelah diketahui, tentunya pemerintah atau pemegang kebijakan bisa mengetahui bagaimana keperluan untuk melakukan pendidikan kewarganegaraan dan pembinaan kebangsaan terkait dengan bela negara ini, dan pada muaranya adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizen*) dan menumbuhkan rasa nasionalisme warga negara terhadap negaranya.

#### **B. Saran**

Sebagai warga negara, seharusnya kita memenuhi kewajiban dan hak kita, dalam hal ini, terkait bela negara adalah kewajiban kita yang secara eksplisit disebutkan di UUD 1945 dan seharusnya kita laksanakan untuk menunjukkan bahwa kita adalah warga negara yang baik, namun untuk mewujudkannya, kita perlu terus menerus belajar dan memahami terkait apa yang dimaksud dengan bela negara itu sendiri.



## Daftar Pustaka

Bartens. 2004. *Value Education. Massachusetts* : Addison Wesley Publishing Company.

Chaidir Basrie. 1995. *Bela Negara, Implementasi dan Pengembangannya* “ Universitas Indonesia Press, 1995

Departemen Pertahanan RI Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. (2004). Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara; SK Dirjen Potan Dephan Nomor : Skep/56/XII/2004. Jakarta.

Djahiri, Kosasih. 2007. *Stategi Pembelajaran Afektif*. Bandung: Alfabeta

Fraenkel, J.R. 1977. *How to Teach Value: an Analytic Approach*. Englewood Cliffs.NJ: Prentice-Hall

Freddy K Kalidjernih. 2011. *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan: Edisi Ketiga*. Bandung: Widya Aksara Press

Kaelan. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma

Komalasari & Budimansyah, D. "Pengaruh Pembelajaran Kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Kompetensi Kewarganegaraan Siswa SMP". Akta Civicus, Tahun 2008, Vol. 2, No. 1. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan UPI.

Magnis-Suseno, Franz. 1988. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

R.M. Sunardi. 2004. *Pembinaan Ketahanan Bangsa: Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Kuarternita Adidarma

R.M. Sunardi. 2005. *Pembinaan Kebangsaan Indonesia: Dalam Rangka Menjaga Integritas Negara dan Pembentukan Jati Diri Bangsa*. Jakarta: PT. Kuarternita Adidarma

Ralph Barto Perry. (1974). *Introductory Reading in Ethics*. New York : Hart Publishing Company,Inc.

Wiliam F. O'neil, 2008. *Ideologi-Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

William J. Rothwell. 1996. *Moral Leadership (Getting to The Heart Of School Improvement)*. San Francisco : Jossey-Bass Publishers.

Peraturan Perundang-Undangan:

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Internet:

Detik.com, berita Bela Negara: Menhan: Perang ke Depan Bukan Tembak Menembak, Tapi Cuci Otak, Kamis 22 Oktober 2015

Detik.com, berita Bela Negara: Menhan: Kalau Soft Power Kuat, 100 Negara pun Tak akan Mampu Menggoyang, Kamis, 22 Oktober 2015